

Pariwisata Budaya Sebagai Wahana Pemertahanan Identitas Kultural

Ida Bagus Gde Pujaastawa
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
guspuja@gmail.com

Abstrak

Dewasa ini fenomena globalisasi telah melanda masyarakat di berbagai belahan dunia yang menyebabkan mereka dapat saling terhubung dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya aspek politik, ekonomi, dan kultural. Perkembangan sektor pariwisata sebagai industri global merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya akselerasi dan spektrum globalisasi. Berkembangnya sektor pariwisata sebagai industri global tidak saja membuka peluang bagi masyarakat di berbagai belahan dunia untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga dikhawatirkan dapat mengancam ketahanan identitas kultural mereka. Oleh karenanya, kebijakan pengembangan pariwisata seyogyanya tidaklah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memberi manfaat bagi ketahanan identitas kultural secara berkelanjutan. Pulau Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata yang sudah populer baik di kalangan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pendapatan dari sektor pariwisata cenderung meningkat dari tahun-ke tahun mengungguli sektor-sektor lainnya. Oleh sejumlah pihak, perkembangan pariwisata Bali yang semakin pesat dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman terhadap eksistensi kebudayaan Bali. Kekhawatiran tersebut diekspresikan dalam bentuk jargon seperti “pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”. Dalam jargon tersebut tersirat paradigma pengembangan industri pariwisata di Bali yang diharapkan lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketahanan budaya Bali secara berkelanjutan. Paradigma ini diharapkan dapat menghindarkan Bali dari objektifikasi untuk kepentingan industri pariwisata yang semata-mata bertujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial budaya dan lingkungan yang ditimbulkannya. Upaya ke arah itu dilakukan dengan menetapkan pariwisata budaya sebagai corak pengembangan pariwisata Bali. Kebijakan ini menyiratkan adanya upaya pendayagunaan kebudayaan Bali sebagai potensi utama dengan menekankan relasi timbal-balik yang saling menuntungkan antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *pariwisata budaya, pemertahanan, identitas kultural, globalisasi*

Abstract

Today the phenomenon of globalization has hit people in various parts of the world which causes them to be connected to each other in various aspects of life, including political, economic and cultural aspects. The development of the tourism sector as a global industry is one of the factors that has a significant influence on the increasing acceleration and spectrum of globalization. The development of the tourism sector as a global industry not only opens opportunities for people in various parts of the world to increase their income, but is also feared to threaten the resilience of their cultural identity. Therefore, tourism development policies should not only be oriented towards increasing economic welfare, but also provide benefits for the resilience of cultural identity in a sustainable manner. The island of Bali is one of the popular tourist destinations for both domestic and foreign tourists. Revenue from the tourism sector tends to increase from year to year outperforming other sectors. By a number of parties,

it is feared that the development of Bali tourism which is increasing rapidly will pose a threat to the existence of Balinese culture. These concerns are expressed in terms of jargon such as “tourism for Bali, not Bali for tourism”. In this jargon, the paradigm for developing the tourism industry in Bali is implied, which is expected to be more oriented towards improving people's welfare, environmental sustainability, and the resilience of Balinese culture in a sustainable manner. This paradigm is expected to prevent Bali from being objectified for the benefit of the tourism industry which is solely aimed at making economic profits without regard to the socio-cultural and environmental impacts it causes. Efforts in this direction are carried out by establishing cultural tourism as a style of tourism development in Bali. This policy implies efforts to utilize Balinese culture as the main potential by emphasizing the dynamic reciprocal relations between tourism and culture that make both develop synergistically, harmoniously and sustainably.

Keywords: *cultural tourism, defense, cultural identity, globalization*

1. Pendahuluan

Belakangan ini kian banyak negara melirik sektor pariwisata untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka, sehingga menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling cepat dan dinamis di seluruh dunia. Berdasarkan laporan UNWTO bahwa kontribusi pariwisata terhadap perekonomian dunia sebelum pandemi Covid-19 mencapai 3,5 triliun US dollar. Tak terkecuali Indonesia, sebelum berjangkitnya Pandemi Covid-19, pariwisata menjadi sektor penyumbang devisa terbesar ketiga setelah kelapa sawit dan batu bara. Kontribusi sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa negara sebelum pandemi mencapai 17,76 miliar USD (Bank Indonesia, 2018). Perkembangan sektor pariwisata juga memberi kontribusi signifikan terhadap pergerakan sektor perekonomian lainnya seperti perdagangan, industri kerajinan, transportasi, dan usaha jasa lainnya.

Pulau Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata yang sudah populer baik di kalangan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pendapatan dari sektor pariwisata cenderung meningkat dari tahun-ke tahun mengungguli sektor-sektor lainnya. Hingga sejauh ini Bali tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap devisa negara dari sektor pariwisata dengan kontribusi mencapai 40%, disusul DKI Jakarta (30%), dan Kepulauan Riau (20%) (Ananda, t.t.). Meskipun diakui bahwa perkembangan sektor pariwisata mampu memberi manfaat ekonomi yang cukup signifikan, namun juga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kebudayaan masyarakat lokal. Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat pariwisata merupakan fenomena perjumpaan kebudayaan di mana kebudayaan yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Dalam hal ini kebudayaan lokal (penerima) cenderung berkedudukan sebagai variabel yang dipengaruhi (dependent variabel) dan

kebudayaan asing sebagai variabel yang mempengaruhi (independent variabel). Dalam konteks pariwisata, interaksi antara kebudayaan wisatawan dengan kebudayaan tuan rumah cenderung menimbulkan perubahan-perubahan pada kebudayaan tuan rumah (Pujaastawa, 2019). Menurut Haviland (1993), salah satu konsekwensi dari fenomena perjumpaan kebudayaan adalah dekulturasi atau hilangnya bagian-bagian substansial dari kebudayaan tuan rumah. Dampak pariwisata terhadap kebudayaan tuan rumah akan mengalami titik yang paling kritis ketika perkembangan pariwisata mengarah pada pariwisata massa (Smith, 1989).

Di samping dapat dipandang sebagai gejala ekonomi, pariwisata juga dapat dipandang sebagai gejala sosial-budaya, karena pariwisata merupakan fenomena interaksi lintas budaya, yakni hubungan timbal-balik antarindividu atau kelompok orang yang memiliki identitas budaya, lingkungan sosial, sikap mental, dan susunan psikologis yang berbeda (Nettekoven, 1976; Wahab, 1989: 65). Interaksi yang bersifat akumulatif dan intensif antara wisatawan dan tuan rumah dapat menimbulkan dampak sosial-budaya yang bersifat positif ataupun negatif. Dengan kata lain, interaksi lintas budaya yang muncul dalam pariwisata dapat menjadi keberuntungan atau malapetaka, dan hal ini sangat tergantung pada kebijakan pengembangan pariwisata yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Dampak pariwisata dinilai bersifat negatif apabila menimbulkan perubahan-perubahan yang tidak diinginkan atau merugikan eksistensi kebudayaan masyarakat setempat. Sebaliknya dampak pariwisata dinilai positif apabila mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, revitalisasi dan konservasi bagi eksistensi kebudayaan masyarakat setempat, serta pelestarian lingkungan (Pujaastawa, 1989).

Terkait dampak pariwisata terhadap kebudayaan Bali, sudah sejak tiga dasa warsa silam sejumlah pihak telah menyampaikan pandangan kritisnya terhadap perkembangan pariwisata massa di Bali yang dikhawatirkan dapat meyeret kebudayaan Bali ke tengah arus globalisasi dan membawa daerah ini menjadi Eropa kedua, atau mengarah kepada Waikikinization (lihat Seda, 1990: 59; Noronha, 1976: 177; Stanton, 1989). Fenomena ini merupakan ancaman serius terhadap ketahanan identitas kultural masyarakat Bali sebagai bagian integral dari identitas kultural Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Terlebih lagi dengan kian gencarnya proses globalisasi yang menyebabkan interkoneksi antarmasyarakat di berbagai belahan duna menjadi semakin intensif, maka diperlukan berbagai upaya untuk untuk menjaga dan mempertahankan

identitas kultural Bangsa Indonesia yang bhinneka tunggal ika. Hal ini menjadi penting mengingat identitas merupakan eksistensi dan jati diri dari sebuah bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain.

2. Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literature atau studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sejumlah pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun pustaka yang dimaksud dapat berupa buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan beberapa jenis informasi yang bersumber pada situs-situs internet yang memuat masalah-masalah kepariwisataan dan identitas budaya. Melalui studi literature selain dapat membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang permasalahan yang dikaji secara lebih luas dan mendalam, juga menghindari kemungkinan terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian.

3. Globalisasi dan Identitas Kultural

Dewasa ini fenomena globalisasi telah melanda masyarakat di berbagai belahan dunia yang menyebabkan mereka dapat saling terhubung dalam berbagai aspek kehidupan. Robertson (1992) memandang globalisasi sebagai proses penyatuan dunia yang menyebabkan masyarakat di seluruh dunia menjadi saling terhubung dan tergantung dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya aspek politik, ekonomi, dan kultural. Dari berbagai karya teoritis sosial mengenai globalisasi, tulisan ini lebih mengacu pada hasil telaah Ritzer dan Goodman (2007), terhadap sejumlah teori globalisasi yang menyimpulkan bahwa globalisasi dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik, dan atau institusional. Lebih jauh dinyatakan bahwa globalisasi kultur dapat dilihat sebagai ekspansi transnasional dari kode dan praktik bersama (homogenitas), atau sebagai proses di mana aspek-aspek kultural lokal dan global saling berinteraksi untuk menciptakan semacam perpaduan yang mengarah pada pencangkakan kultur (heterogenitas). Kecenderungan yang mengarah pada homogenitas kerap diasosiasikan dengan “imperialisme kultural” yang ditandai dengan kian menguatnya pengaruh internasional terhadap kultur tertentu. Globalisasi ekonomi cenderung dilihat sebagai penyebaran prinsip-prinsip ekonomi pasar ke seluruh penjuru dunia yang mengarah pada homogenitas ekonomi dunia. Namun demikian, juga diakui bahwa terdapat beberapa perbedaan (heterogenitas) di pinggiran ekonomi global. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud misalnya komodifikasi kultur lokal yang dapat

mengkaitkan berbagai produk dengan kebutuhan dari beragam spesifikasi lokal.

Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap identitas budaya lokal. Beberapa dampak globalisasi terhadap identitas budaya lokal antara lain (1) menyebarnya pengaruh budaya asing terutama melalui media massa dan teknologi informasi yang dapat menggeser atau mengubah identitas budaya lokal; (2) konvergensi kebudayaan, di mana masyarakat di berbagai belahan dunia dengan latar belakang budaya yang beragam sama-sama menggemari atau mengonsumsi unsur-unsur budaya yang sama seperti bahasa, jenis-jenis hiburan, olahraga, pakaian, makanan, dan berbagai produk lainnya yang dapat mengancam keberlanjutan identitas budaya lokal; (3) menyebarnya ideologi kapitalisme yang lebih mengedepankan nilai-nilai individualisme, materialisme, dan konsumerisme; dan (4) dalam beberapa kasus, globalisasi juga dapat memicu konflik identitas ketika nilai-nilai budaya lokal harus berhadapan dengan nilai-nilai budaya asing.

Meskipun globalisasi berpotensi menyebabkan terjadinya konvergensi kebudayaan, namun globalisasi juga dapat memotivasi upaya pelestarian identitas budaya, di mana orang-orang mulai sadar akan pentingnya menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya mereka, dan berusaha untuk melestarikannya dalam konteks global yang berubah. Sebagian masyarakat dapat lebih terbuka terhadap pengaruh global, sementara yang lain lebih mementingkan pelestarian identitas budaya mereka. Hal ini dapat menciptakan beragam respon terhadap globalisasi dan identitas budaya dalam berbagai konteks di seluruh dunia

4. Pariwisata Global dan Identitas Kultural

Salah satu sisi kehidupan masyarakat modern adalah kian berkembangnya pranata untuk memenuhi dorongan keinginan manusia akan hiburan. Kehidupan masyarakat modern yang bersifat kompleks ditandai dengan penggunaan energi, waktu, dan pikiran yang intensif. Hal tersebut menyebabkan terakumulasinya kelelahan fisik dan pikiran yang menuntut adanya penyegaran kembali (*refreshing*) dengan menikmati berbagai jenis hiburan. Pada masyarakat modern pemenuhan tuntutan akan hiburan atau memanfaatkan waktu luang merupakan kebutuhan yang sangat penting, meskipun untuk itu orang harus menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Dalam perkembangan selanjutnya, upaya-upaya pemenuhan akan hiburan tersebut dikelola secara lebih intensif sehingga melahirkan bentuk industri pariwisata seperti yang dikenal sekarang ini, di mana keberadaannya menimbulkan berbagai fenomena yang berpengaruh

signifikan terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia (Pujaastawa, 2019).

Belakangan ini banyak negara di dunia memberikan dukungan terhadap pengembangan industri pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan daya saing di pasar pariwisata global. Upaya-upaya yang dimaksud antara lain meningkatkan kualitas produk pariwisata, yakni berbagai elemen terkait dengan industri pariwisata seperti atraksi, akomodasi, transportasi, makanan, kegiatan rekreasi, layanan tur, dan berbagai layanan lainnya yang dapat meningkatkan kepuasan wisatawan. Untuk itu, produk pariwisata harus dirancang dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan, karena produk pariwisata yang baik di samping akan meningkatkan kualitas destinasi dan pengalaman wisatawan, juga berkontribusi pada pertumbuhan industri pariwisata.

Berkembangnya industri pariwisata global tentunya mengharuskan tuan rumah untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan budaya pariwisata global berupa sistem nilai, perilaku, dan fasilitas fisik dengan standar internasional. Seperti dikemukakan Pujaastawa (2019), bahwa pariwisata pada dasarnya merupakan fenomena kontak atau perjumpaan antarkebudayaan, di mana masyarakat tuan rumah dihadapkan dengan budaya pariwisata dan budaya wisatawan. Untuk itu tuan rumah dituntut untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti penggunaan bahasa asing, norma-norma pergaulan internasional, dan penggunaan fasilitas-fasilitas berstandar internasional, dan unsur-unsur budaya asing lainnya. Disadari atau tidak, keberadaan unsur-unsur budaya luar tersebut lambat laun akan diserap ke dalam kebudayaan tuan rumah. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan terjadinya pergeseran atau perubahan sosial-budaya pada masyarakat tuan rumah.

Contoh konkret mengenai hal tersebut, misalnya, dalam bidang bahasa, masyarakat lokal sebagai tuan rumah mau tidak mau harus terbiasa menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan bahasa lokal. Dalam bidang kesenian, berbagai jenis kesenian asing seperti musik, film, dan mode Barat kian digemari dan dengan mudah diserap oleh masyarakat lokal sehingga menggeser atau paling tidak menyaingi peran kesenian lokal. Demikian pula dengan gaya hidup, tidak sedikit warga masyarakat lokal telah meniru gaya hidup wisatawan yang cenderung bebas dan

individual. Akumulasi dari persoalan-persoalan tersebut tentunya dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada kebudayaan lokal. Di samping itu, pariwisata juga dapat merangsang munculnya pergeseran fungsi kebudayaan lokal seperti sekularisasi dan komersialisasi kesenian sakral dan lain sebagainya.

5. Pariwisata Budaya sebagai Wahana Pemertahanan Identitas Kultural

5.1. Pariwisata Budaya

Salah satu persoalan krusial dalam memahami pariwisata budaya adalah mengenai persoalan definisi, yakni pariwisata budaya tidak mudah didefinisikan (Richards, 2003; Roscheidt, 2008; Mosavi dkk., 2016). Tidaklah mengherankan apabila ditemukan beragam definisi tentang pariwisata budaya dari berbagai perspektif. Namun demikian, definisi akademis mengenai pariwisata budaya yang bersifat baku dan disepakati oleh kalangan akademisi tampaknya masih harus ditunggu. Salah satu penyebabnya adalah beragamnya definisi tentang kebudayaan dan berkembangnya jenis-jenis pariwisata dengan objek spesifik yang sejatinya merupakan bagian dari kebudayaan, seperti wisata seni, wisata etnik, wisata warisan budaya, dan sebagainya.

Menurut Richard (2003), Tanpa definisi yang baku, sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain mengenai apa yang dimaksud dengan pariwisata budaya, dan membuat kebijakan atau rencana pengelolaan menjadi jauh lebih sulit. Lebih jauh dijelaskan tanpa definisi yang baku, promosi dan pemasaran wisata budaya akan menjadi rancu dengan jenis-jenis pariwisata dengan objek-objek spesifik yang sejatinya menjadi bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu, pendekatan yang paling praktis adalah memilih definisi yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi (dikaji).

Terkait dengan upaya penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata, definisi pariwisata budaya lebih menekankan pada aspek daya tarik, yakni kebudayaan sebagai potensi daya tarik dominan. Salah satu yang dapat dijadikan rujukan, misalnya definisi pariwisata budaya yang secara legal formal dirumuskan dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya. Perda tersebut menetapkan bahwa corak kepariwisataan yang dikembangkan di Provinsi Bali adalah pariwisata budaya. Dalam Perda ini pariwisata budaya didefinisikan sebagai salah satu jenis pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktor kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu.

Penetapan pariwisata budaya sebagai corak pengembangan kepariwisataan di Bali dilandasi oleh pertimbangan bahwa Bali merupakan sebuah ekosistem pulau kecil

dengan potensi sumberdaya alam yang sangat terbatas, namun kaya akan potensi sumberdaya budaya. Konsep pariwisata budaya dilandasi oleh proposisi bahwa kebudayaan berfungsi terhadap pariwisata menurut pola hubungan yang bersifat linier dan satu arah. Dalam aplikasinya, konsep ini cenderung dimaknai sebagai obyektivikasi kebudayaan di mana kebudayaan semata-mata diposisikan sebagai obyek demi kepentingan pariwisata.

Sejalan dengan gencarnya wacana mengenai konsep pembangunan berwawasan budaya dan lingkungan, dilakukan penyempurnaan terhadap Perda Nomor 3 tahun Antropologi Pariwisata 31 1974 menjadi Perda Nomor 3 Tahun 1991, yang menetapkan pariwisata budaya sebagai jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang di dalamnya tersirat suatu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya berkembang secara serasi, selaras, dan seimbang. Konsep ini dilandasi oleh proposisi bahwa kebudayaan dan pariwisata harus berada dalam pola hubungan interaktif yang bersifat dinamik dan progresif (Geriya, 1996).

Konsep pembangunan pariwisata berwawasan budaya dipandang sangat penting dan relevan mengingat pariwisata sebagai fenomena modern mengandung sejumlah konsekwensi terhadap kebudayaan masyarakat lokal atau tuan rumah. Perkembangan pariwisata pada tingkat tertentu di samping membawa manfaat positif bagi perekonomian, juga kerap menimbulkan ancaman bagi keberadaan budaya tuan rumah. Menyadari hal tersebut, maka konsep pariwisata budaya hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya untuk menggali dan mengembangkan potensi kebudayaan sebagai komoditas pariwisata semata, tetapi juga sebagai upaya pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan lokal. Demikian pula dengan pendekatan pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan menuntut adanya pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekologi sebagai daya tarik wisata yang sekaligus merupakan upaya konservasi.

Dengan mempertimbangkan dinamika kepariwisataan nasional dan global, Perda Nomor 3 Tahun 1991 disempurnakan menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Di samping masih mempertahankan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai landasan utamanya, perda ini juga secara tersurat menekankan pentingnya falsafah Tri Hita Karana dalam pembangunan

kepariwisataan di Bali, seperti tertuang pada pasal 1 angka 14 sebagai berikut.

“Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan”.

Tri Hita Karana yang berarti tiga penyebab kesejahteraan merupakan sebuah kearifan lokal yang telah menjadi falsafah hidup masyarakat Bali yang menekankan relasi harmonis antara manusia dengan lingkungan spiritual (parhyangan), lingkungan sosial (pawongan), dan lingkungan fisik (palemahan). Relasi yang harmonis antara manusia dan ketiga lingkungan tersebut diyakini akan mengantarkan manusia pada kesejahteraan lahir dan bathin (Pujaastawa, 2022)

Konsep pariwisata budaya tidak saja mengedepankan kekayaan budaya lokal sebagai potensi daya tarik utama, tetapi juga menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Berbagai komponen kebudayaan lokal yang dapat didayagunakan sebagai daya tarik wisata antara lain kesenian, arsitektur, sistem religi, tradisi, kesejarahan, kepurbakalaan yang memiliki nilai-nilai keunikan dan keindahan. Pendayagunaan komponen-komponen kebudayaan lokal sebagai daya tarik wisata diharapkan akan membawa manfaat signifikan bagi pemertahanan identitas masyarakat lokal. Hal tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain: (a) Promosi; Promosi diartikan sebagai upaya membujuk atau mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Promosi adalah usaha untuk membujuk agar konsumen mau menerima, menjual kembali atau menggunakan barang, jasa atau ide yang dipromosikan. Secara singkat, promosi mencoba mempengaruhi pengetahuan, sikap dan tingkah laku konsumen dan membujuk mereka untuk menerima konsep, jasa atau produk lainnya (Winardi, 2001: 104). Dalam konteks bisnis pariwisata, promosi dapat diartikan sebagai upaya membujuk atau mempengaruhi target wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata yang dipromosikan. Melalui promosi pariwisata

diharapkan para wisatawan dari berbagai penjuru dunia merasa tertarik untuk berkunjung dan mengenal budaya yang dipromosikan. Hal ini dapat membangkitkan rasa bangga dan kesadaran akan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga sangat membantu dalam pelestarian tradisi dan kebiasaan yang mungkin terabaikan. (b) Pendapatan dan Pemberdayaan Ekonomi; Pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat melalui keterlibatannya dalam usaha-usaha kepariwisataan. Dengan meningkatnya pendapatan, masyarakat merasa lebih berdaya dan mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi sumberdaya budaya sebagai bagian dari identitas budaya mereka. (c) Pengakuan Internasional; Tempat-tempat yang menjadi tujuan pariwisata sering kali mendapatkan pengakuan dunia dalam bentuk penghargaan, publikasi dalam media internasional, atau peringkat dalam daftar tujuan wisata populer. Hal ini dapat meningkatkan citra dan identitas suatu tempat di mata dunia. (d) Pendidikan dan Pertukaran Budaya; Kedatangan wisatawan dari berbagai belahan dunia memberi kesempatan bagi masyarakat tuan rumah untuk belajar dan memperluas wawasan mereka tentang dunia luar. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi budaya mereka dalam menghadapi pergaulan lintas budaya. (e) Kesadaran Identitas Regional; Pariwisata juga dapat membantu dalam membentuk kesadaran identitas regional, yakni daerah dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Daerah yang memiliki karakteristik geografis, sejarah, atau budaya tertentu dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai entitas yang unik dan mengembangkan identitas regional yang kuat.

5.2. Pariwisata Budaya dan Pemertahanan Identitas Kultural

Penting untuk diingat bahwa pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam identitas budaya lokal. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata yang arif dan bijaksana sangat penting agar dapat memberi manfaat bagi kelestarian budaya lokal. Melalui pariwisata budaya diharapkan akan terjalin relasi resiprositas (saling memberi dan menerima) antara pariwisata dan kebudayaan, di mana kebudayaan memberi kontribusi sebagai daya tarik utama bagi pengembangan pariwisata, sebaliknya pariwisata memberi kontribusi bagi revitalisasi kebudayaan. Bukti nyata dari hubungan resiprositas semacam itu dapat dijumpai dalam pengembangan kepariwisataan di Bali yang bercorak pariwisata budaya.

Jenis daya tarik wisata budaya yang paling banyak dijumpai di Bali adalah

kompleks pura atau tempat suci bagi pemeluk agama Hindu yang merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Bali. Keberadaan pura yang tersebar di berbagai penjuru Pulau Bali menyebabkan Bali juga dikenal dengan sebutan “The Island of Thousand Temples” atau “Pulau Seribu Pura”. Selain langgam arsitekturnya yang unik, praktik ritual keagamaan yang diselenggarakan secara berkala di masing-masing pura telah menjadi agenda tetap dalam *calendar of events* pariwisata di Bali.

Keberadaan pura sebagai daya tarik wisata budaya di samping membawa implikasi positif terhadap pemeliharaan pura dan lingkungan sekitarnya, juga meningkatkan kualitas upacara keagamaan yang diselenggarakan di masing-masing pura. Studi Pujaastawa (2022) tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu, misalnya, merupakan representasi dari model pengelolaan pariwisata berbasis Tri Hita Karana, sebuah kearifan lokal yang menekankan relasi harmonis antara pariwisata dan lingkungan spiritual (*parhyangan*), sosial (*pawongan*), dan fisik (*palemahan*).

Pengelolaan aspek *parhyangan* menyangkut upaya-upaya yang dilakukan terhadap aspek-aspek lingkungan spiritual demi terwujudnya relasi harmonis antara pariwisata dan lingkungan spiritual. Upaya menjalin relasi harmonis dengan lingkungan spiritual dilakukan melalui cara-cara yang sesuai dengan sistem keyakinan masyarakat setempat seperti menjaga kesucian dan kebersihan pura, pengenaan kain dan selendang bagi pengunjung, biaya perawatan dan pemugaran pura, serta biaya penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Implikasi dari pengelolaan aspek *parhyangan* adalah terbangunnya relasi timbal balik yang bernilai positif antara pariwisata dan lingkungan spiritual. Di satu sisi, keberadaan Pura Uluwatu sebagai tempat suci dengan nilai-nilai keunikannya telah menjadi ikon pariwisata yang sangat populer sehingga memberi kontribusi positif terhadap perkembangan destinasi pariwisata di Bali Selatan pada khususnya dan Bali pada umumnya. Di sisi lain, manfaat yang diperoleh dari perkembangan sektor pariwisata dikontribusikan untuk merevitalisasi atau mendukung keberadaan Pura Uluwatu sebagai pengejawantahan dari lingkungan spiritual.

Pengelolaan aspek *pawongan* menyangkut upaya-upaya yang dilakukan terhadap lingkungan sosial demi terwujudnya relasi harmonis antara pariwisata dan lingkungan sosial. Adapun upaya-upaya yang dilakukan demi terwujudnya relasi harmonis antara pariwisata dan lingkungan sosial adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan hospitalitas. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kawasan

Luar Pura Uluwatu mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat dengan memberi wewenang dan kekuasaan sepenuhnya kepada Desa Adat Pecatu untuk memobilisasi kemampuannya sendiri dalam mengelola sumber daya pariwisata. Konsep ini sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan. Terkait dengan kedudukannya sebagai tuan rumah, hak pengelolaan daya tarik wisata sepenuhnya diserahkan kepada Desa Adat Pecatu yang secara kelembagaan direpresentasikan dalam sebuah badan yakni Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu. Pengelolaan pariwisata yang bertumpu pada konsep pemberdayaan masyarakat ini menyebabkan pendapatan dari sektor pariwisata lebih berpihak kepada tuan rumah.

Terkait dengan upaya peningkatan hospitalitas di samping mengacu prinsip-prinsip sadar wisata dan sapta pesona, juga berpedoman pada kearifan-kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai hospitalitas. Adapun nilai-nilai hospitalitas yang dijadikan acuan oleh pihak tuan rumah dalam berinteraksi dengan wisatawan di antaranya adalah (a) *Angawe Sukaning Wong Len*, yang berarti berbuat untuk kesejahteraan orang lain. Konsep ini merupakan penjabaran konsep hubungan antara manusia dan lingkungan sosialnya agar senantiasa menjaga relasi harmonis melalui perbuatan-perbuatan yang baik demi kesejahteraan orang lain; (b) *Tat Twam Asi*, merupakan semboyan utama dalam ajaran tata susila Hindu yang mengandung arti “engkau adalah dia”. Ajaran ini mengandung nilai-nilai moral untuk membina hubungan yang selaras dan seimbang antarsesama. *Tat twam asi* mengajarkan agar setiap orang harus bertanggung jawab atas segala tindakannya dan lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. *Tat twam asi* juga mengandung nilai-nilai toleransi dan saling menghargai perbedaan (Setyawan, 2020); (c) *Tri Kaya Parisuda*, menekankan pada pengendalian terhadap tiga hal yang paling mendasar pada diri setiap manusia sebagai makhluk social-budaya, yakni pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan *manacika* (pikiran yang baik), *wacika* (perkataan yang baik), dan *kayika* (perbuatan yang baik). Menurut Andiani dkk. (2020), konsep *Tri Kaya Parisuda* mengandung nilai-nilai hospitalitas yang diyakini dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan terhadap kualitas layanan sehingga akan dapat meningkatkan loyalitas wisatawan terhadap destinasi wisata yang dikunjungi.

Berkaitan dengan servis atau layanan yang merupakan aspek utama pariwisata

sebagai industri jasa, juga terdapat sejumlah konsep kearifan lokal yang dijadikan acuan seperti *sathya* (kebenaran), *dharma* (kebajikan), *prema* (cinta kasih), *shanti* (kedamaian), dan *ahimsa* (tanpa kekerasan) (Wena, 2010). Implikasi dari pengelolaan aspek pawongan yang bertumpu pada konsep pemberdayaan masyarakat seperti dipaparkan di atas adalah terbangunnya relasi timbal balik yang bernilai positif antara pariwisata dan lingkungan sosial. Di satu sisi, Desa Adat Pecatu sebagai representasi dari lingkungan sosial berperan sepenuhnya dalam pengelolaan pariwisata, sementara di sisi lain pariwisata memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi dan revitalisasi aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat.

Pengelolaan aspek *palemahan* menyangkut upaya-upaya yang dilakukan terhadap lingkungan fisik demi terwujudnya relasi harmonis antara pariwisata dan lingkungan fisik. Terbangunnya relasi yang harmonis antara pariwisata dan lingkungan fisik diyakini akan mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pariwisata dan lingkungan fisik. Pengelolaan aspek palemahan atau lingkungan fisik seperti dipaparkan di atas membawa implikasi ekologis berupa konservasi lingkungan di sekitar daya tarik wisata, termasuk lingkungan pantai dan laut, konservasi Kawasan Hutan Alas Kekeran dan satwa kera sebagai satwa dominan, dan meningkatnya estetika dan konservasi lingkungan di sekitar daya tarik wisata.

Model pengelolaan daya tarik wisata berbasis Tri Hita Karana di samping membawa manfaat yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi, juga revitalisasi budaya, dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model pengembangan pariwisata berbasis Tri Hita Karana merupakan sebuah model pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan manfaat pariwisata terhadap ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Studi di atas menunjukkan bahwa pariwisata budaya telah mampu memberi manfaat positif bagi pelestarian budaya baik pada tataran sistem nilai (ideofak), perilaku (sosiofak), dan fisik (artefak) yang merupakan bagian dari identitas kultural masyarakat setempat. Bentuk lain dari kontribusi pariwisata budaya terhadap pemertahanan identitas kultural adalah meningkatnya apresiasi terhadap kebudayaan, seperti yang dikemukakan McKean (dalam Pujaastawa, 2019), bahwa pariwisata dipandang sebagai fenomena modernisasi masyarakat dan kebudayaan Bali yang

sesungguhnya berlangsung melalui pelestarian tradisi masa lalu. Kedatangan para wisatawan ke Bali melahirkan apa yang disebutnya sebagai involusi kebudayaan, yaitu elaborasi yang semakin baik dalam bentuk dan praktik-praktik kebudayaan, seperti yang tercermin dalam berbagai jenis kesenian tradisional yang kian sering dan meluas dipertunjukkan daripada sebelumnya.

Meningkatnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal sejalan dengan berkembangnya pariwisata budaya juga dapat dilihat dari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang diselenggarakan setiap tahun dengan melibatkan duta-duta kesenian dari seluruh Kabupaten/kota di Bali. Pesta kesenian tahunan yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Bali ini, di samping menjadi daya tarik wisata, sekaligus sebagai ajang kreativitas para seniman dalam upaya mendukung program pemerintah dalam hal penggalan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali yang merupakan bagian dari identitas kultural masyarakat Bali. Pelestarian seni budaya antara lain dengan menampilkan kesenian-kesenian klasik yang terpendam bahkan nyaris punah. Pesta Kesenian Bali menjadi media dan sarana memotivasi masyarakat untuk menggali, menemukan, menampilkan seni budaya yang menjadi bagian dari jati diri mereka.

6. Kesimpulan

Pariwisata ibarat pisau bermata dua, di satu sisi dapat mendatangkan manfaat untuk meningkatkan perekonomian, namun di sisi lain dapat mengancam eksistensi budaya tuan rumah. Oleh karenanya kebijakan pengembangan pariwisata hendaknya di samping mampu memberi manfaat ekonomi, juga mampu memberi manfaat bagi pelestarian budaya secara berkelanjutan. Konsep pariwisata budaya pada dasarnya merupakan konsep kebijakan pengembangan pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan sebagai potensi daya tarik utama sekaligus menjadikan pariwisata sebagai wahana untuk memajukan kebudayaan. Dengan demikian konsep pengembangan pariwisata budaya hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya untuk menggali dan mengeksploitasi potensi kebudayaan sebagai komoditas pariwisata semata, tetapi juga sebagai upaya pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan lokal. Konsep pariwisata budaya menekankan terbangunnya relasi yang saling menguntungkan antara pariwisata dan kebudayaan yang merupakan bagian utama dari prinsip pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, melalui pariwisata budaya diharapkan eksistensi budaya lokal yang menjadi identitas kultural masyarakat tuan rumah dapat tetap terjaga kelestariannya.

7. Daftar Pustaka

- Ananda, C. F. t.t. *Pariwisata: Kapan Bangkit?* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. <https://feb.ub.ac.id/profil-2/>.
- Andiani, N. D., Antara, I. M., Ardika, W., Sunarta, I. N. (2020). “Peran Nilai Hindu Tri Kaya Parisudha dalam Peningkatan Loyalitas Wisatawan terhadap Desa Wisata Pedawa, Bali Utara”. *Jurnal Kajian Bali, Vol. 10, No. 02, Oktober 2020.* <https://doi.org/10.24843/JKB.2020.v10.i02.p12>.
- Bank Indonesia. (2018). Mendulang Devisa Melalui Pariwisata. *Gerai Info Edisi 73 Tahun VIII/2018*, halaman 3.
- Geriya, W. (1996). *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global Bunga Rampai Antropologi Pariwisata*. Denpasar: Upada Sastra.
- Haviland, W. A. (1993). *Antropologi Jilid 2 Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Mousavi, S. S., Doratli, N., Mousavi, S. N., and Moradiahari, F. (2016). Defining Cultural Tourism. *International Conference on Civil, Architecture and Sustainable Development (CASD-2016)* Dec. 1-2, 2016 London (UK).
- Nettekoven, L. (1976). “Mechanism of Intercultural Interaction” dalam *Emanuel de Kuddt (ed.): Tourism Passport to Development*. New York: Oxford University Press.
- Noronha, R. (1976). “Paradise Reviewed: Tourism in Bali”, dalam *Emanuel de Kuddt (ed.): Tourism Passport to Development*. New York: Oxford University Press
- Pujaastawa, I. B. G. (1989). *Antropologi Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Pujaastawa, I. B. G. (2022). Model Pariwisata Berbasis Tri Hita Karana: Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Luar Pura Uluwatu, Desa Pecatu, Bali. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*
- Richards, G. (2003). What is Cultural Tourism? In: *van Maaren, A. (ed.), Erfgoed voor Toerisme*, Weesp: Nationaal Contact Monumenten
- Ritzer, G. (2004). *Teori Sosial Posmodern*. Yogyakarta: Juxtapose Research and Publication Study Club Bekerjasama dengan Kreasi Wacana.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage.
- Rohrscheidt, A. M. v. (2008). *Cultural Tourism – concerning the definition*. Turystyka Kulturowa, Nr 1/2008 (Listopad 2008).
- Seda, F. (1990). “Bali Semakin Memprihatinkan”, dalam: *Usahawan Indonesia, XIX, No. 12*. Jakarta: Lembaga Management FE – UI, Halaman: 59
- Setyawan, D. (2020). *Tat Twam Asi untuk Kehidupan yang Rukun dan Damai*.

<https://diy.kemenag.go.id>. Diakses 20 Juli 2021

Smith, V. L. (ed.). (1989). *Hosts and Guests the Anthropology of Tourism*. Second Edition. Philadelphia: University of Pennsylvania.

Stanton, M. E. (1989). “The Polynesian Cultural Center: A Multi Ethnic Model of Seven pacific Cultures”, dalam *Valene L. Smith (ed.) Hosts and Guests the Anthropology of Tourism Second Edition*. Philadelphia: University of Pennsylvania

Wahab, S. (1996). *Manajemen Kepariwisataaan*. (Alih bahasa: Frans Gomang). Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Wena, I. M. (2010). *Melayani dalam Konsep Hindu. Dharma Wacana Disampaikan pada Tilem Keulu*. <https://bphsul-sel.wordpress.com>. Diakses 20 Juli 2021

Winardi, J. (2001). *Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.